Policy Talks

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

# Memaknai Hari Kesehatan Mental dan Advokasi Hak Penyandang Disabilitas Mental di Tempat Kerja



**Dewi Rahmawati Nur Aulia**

Peneliti Bidang Sosial
The Indonesian Institute

Policy Talks

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH




# Membangun Kerangka Kebijakan Kesehatan Mental yang Komprehensif dan Inklusif

Policy Talks

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

**Dalam Rangka memperingati Hari Kesehatan Mental pada Oktober ini, World Federation of Mental Health (WFMH) mengangkat tema "It is Time to Prioritize Mental Health in the Workplace".**

**Tema kampanye global ini diangkat bahwa tempat kerja dapat menjadi lokus sumber meningkatnya gangguan kesehatan mental manusia.**

**Berdasarkan data dari Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Kepolisian RI (Polri), ada 971 kasus bunuh diri di Indonesia sepanjang periode Januari hingga 18 Oktober 2023. Angka itu sudah melampaui kasus bunuh diri sepanjang tahun 2022 yang jumlahnya 900 kasus (databoks.katadata.co.id, 18/10/2023).**

**Policy Talks**

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Kesehatan mental merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh lintas lapisan masyarakat. Hingga saat ini, masyarakat memandang bahwa penyandang masalah kesehatan mental hanya terbatas pada pemaknaan klinis seperti Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Padahal, semua manusia memiliki potensi yang sama dalam kerentanan mengalami kesehatan mental. Orang-orang yang bertahan dalam kondisi demikian sering kali disebut dengan istilah Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (UU No. 18/2014) menyebutkan ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup, sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa. Individu /kelompok dengan gangguan ini hidup berada disekitar masyarakat.

Policy Talks

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Data riset kesehatan dasar (Riskesdas) tahun 2018 diketahui bahwa jumlah data kasus ODGJ berat adalah 1,8 per 1000 penduduk atau 429.332 ODGJ berat. Adapun target layanan kesehatan jiwa terhadap ODGJ berat pada tahun 2024 adalah sebesar 100% sesuai Standar Pelayanan Minimum bidang kesehatan. ODGJ berat yang mengalami pemasungan sebesar 31,5% dari jumlah penderita. Sementara, ODGJ yang teratur minum obat hanya 48.9 % (Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, 2020).

Policy Talks

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Trautman dalam penelitiannya yang berjudul “The Economic Cost of Mental Health” perawatan terhadap penyakit mental akan menimbulkan dua jenis biaya, yaitu biaya terlihat dan tidak terlihat. Pembiayaan yang terlihat tersebut dapat dikeluarkan dalam bentuk biaya kunjungan dokter, konsumsi obat-obatan, terapi psikologi, dan lainnya.

Pembiayaan yang tidak terlihat dapat ditimbulkan dampak atas ketidakmampuan karyawan tersebut melakukan tanggung jawab pekerjaan sehari-hari yang berdampak pada produktivitas, kinerja dan prestasi kerja (economica.id, 10/10/2019). Pembiayaan yang tidak terlihat tersebut merupakan angka kerugian yang ditanggung oleh pelaku usaha atas dampak permasalahan kesehatan masalah yang tidak ditangani. Hasil penelitian tersebut juga dapat menjelaskan betapa kerugian ekonomi akibat menurunnya produktivitas pekerja yang disebabkan permasalahan Kesehatan mental sangat membahayakan.

Policy Talks

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH




# Layanan E-Jiwa

**Layanan berbasis aplikasi yang diluncurkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Khusus Jakarta (DKJ) ini menjadi alat pendeteksi/screening gangguan kesehatan mental yang dialami oleh individu. Kepala Seksi Usia Produktif, Lanjut Usia dan Kesehatan Jiwa Dinkes DKI Jakarta Lady Margaretha F. Sirait menyatakan E-Jiwa menjadi inovasi yang dihadirkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang menjadi bagian skrining kesehatan jiwa dengan metode SRQ-29 dan ini sudah dipatenkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) (Antaranews.com, 5/6/2024).**

Policy Talks

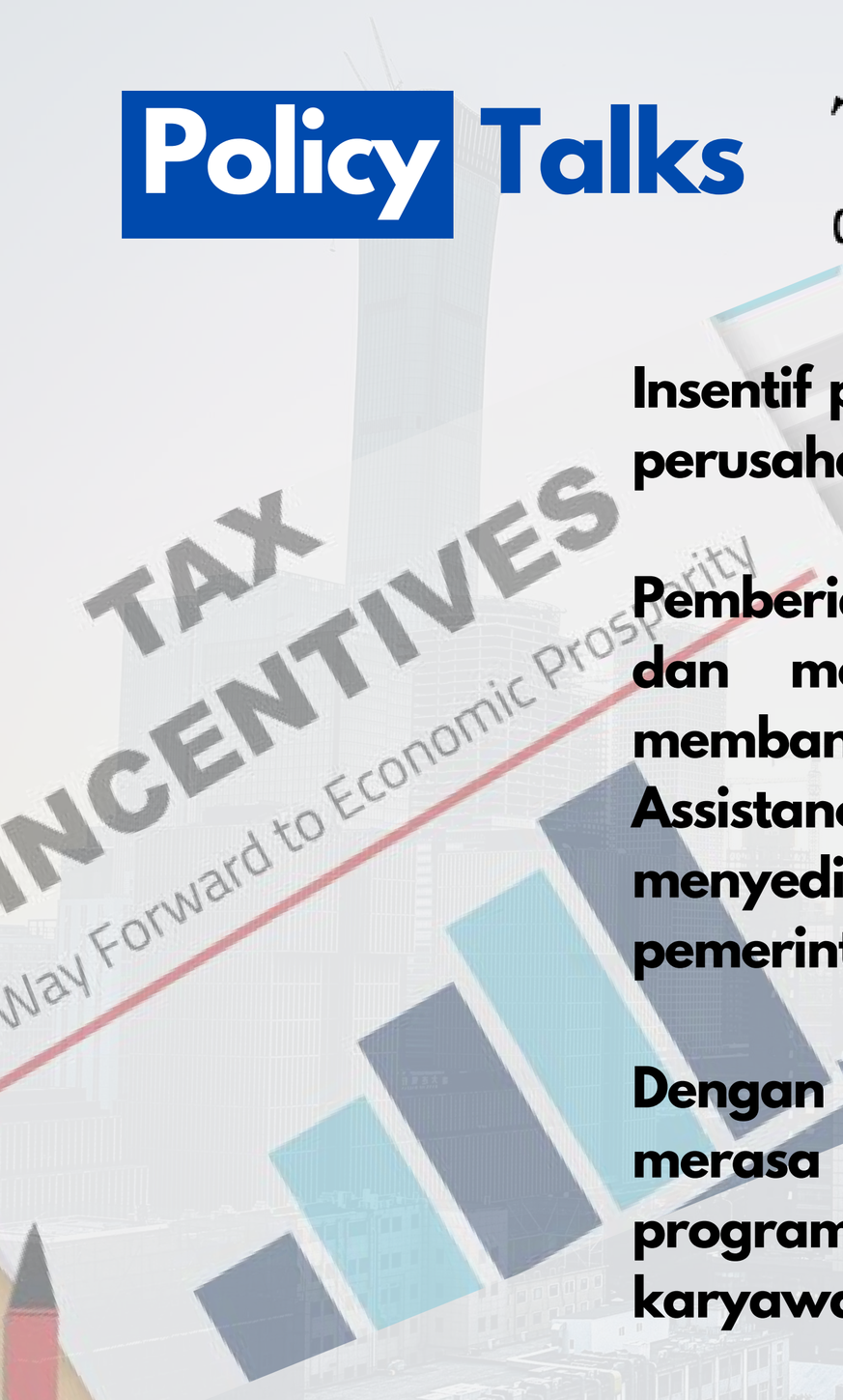
THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

**Penerapan kebijakan EWP (Employee Well-being Policy) di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), misalnya. Selama kepemimpinan Erick Thohir, Kementerian BUMN telah membangun sistem Employee Well-being Policy (EWP) yang ditujukan kepada seluruh dewan komisaris, direksi, dan karyawan BUMN.**

**Kebijakan EWP merupakan program kesejahteraan insan BUMN yang secara menyeluruh meliputi aspek fisik, mental, sosial, dan finansial. Erick Thohir menjelaskan pentingnya ketersediaan fasilitas dalam mendukung kinerja insan perempuan grup BUMN dan penyandang disabilitas seperti fasilitas nursery room, daycare, ramp, guiding block, dan toilet disabilitas serta, monitoring dan evaluasi atas implementasi EWP. Dengan semangat kolaborasi melalui optimalisasi ekosistem BUMN, implementasi program EWP dinilai akan lebih efektif dan efisien, sehingga mampu mendorong perbaikan dan peningkatan manfaat maupun nilai tambah bagi BUMN (bumn.go.id, 31/1/2024).**

**Policy Talks**

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH




**Insentif pajak dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong setiap perusahaan menerapkan kebijakan kesehatan mental di tempat kerja.**

**Pemberian insentif pajak dapat mengurangi beban biaya perusahaan dan mendorong perusahaan untuk mulai berinvestasi dalam membangun program kesehatan mental karyawan seperti Employee Assistance Program (EAP), seminar tentang kesehatan mental, atau menyediakan ruang konseling dari alokasi insentif pajak yang diberikan pemerintah.**

**Dengan adanya kebijakan insentif pajak tersebut, perusahaan akan merasa terbantu secara finansial dalam mengimplementasikan program kesehatan mental dan mendorong produktivitas karyawannya lebih baik.**

Policy Talks

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

# Terima Kasih

Jl. HOS. Cokroaminoto No 92, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Telepon: +6221 3158032
Email: contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com